

REVITALISASI KOPERASI PERIKANAN

Oleh
Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS.^{*)}

I. Pendahuluan

Masih dalam suasana memperingati Hari Koperasi ke-58 dan menyikapi sejumlah permasalahan yang kini kita hadapi bersama sebagai bangsa adalah sangat relevan untuk menggagas cara-cara merevitalisasi Koperasi perikanan di tanah air. Relevansi dan arti strategis dari revitalisasi Koperasi perikanan paling tidak berdasarkan atas empat alasan utama.

Pertama adalah fakta empiris bahwa bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga kini belum mampu mengalahkan dua musuh utama kemanusiaan sebuah negara-bangsa yaitu pengangguran dan kemiskinan. Bahkan sejak krisis finansial yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997, angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin terus membengkak itu masing-masing kini mencapai sekitar 37 juta orang dan 60 juta orang (BPS, 2005). Dan diantara penduduk miskin tersebut, nelayan merupakan kelompok masyarakat yang paling menderita secara ekonomi.

Kedua adalah keyakinan saya, bahwa kemiskinan yang menggelayuti sebagian besar rakyat kita disebabkan terutama karena problem struktural. Artinya kebijakan pemerintah sejak era Orde Baru sampai sekarang cenderung membuat rakyat kecil (kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

memiliki akses yang sangat terbatas atau tidak memiliki akses sama sekali terhadap aset ekonomi produktif. Sementara para konglomerat (pengusaha besar) menikmati akses yang boleh dikatakan berlimpah dan mudah terhadap aset ekonomi produktif (permodalan, informasi, teknologi, manajemen, infrastruktur, dan perlindungan usaha).

Padahal kita paham betul bahwa bagaimanapun seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) bekerja keras membanting tulang, tidak akan berhasil usahanya (bisnisnya) tanpa adanya dukungan aset ekonomi produktif. Kondisi ekonomi yang sangat senjang (*dualistic economy*) inilah yang merupakan produk warisan kebijakan ekonomi masa lalu yang sangat kapitalistik yang telah menjadikan segelintir orang Indonesia kaya raya, tetapi menyengsarakan sebagian besar rakyat.

Ketiga bahwa kondisi perekonomian yang sangat senjang semacam itu pernah menimpa Eropa pada awal lahirnya Revolusi Industri pada Abad-18. Dan, terbukti Koperasi mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut. Bukan hanya mampu mensejahterakan kaum buruh dan golongan ekonomi lemah lainnya, tetapi berhasil membangun hubungan produktif dan

* Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan-IPB, Ketua Umum Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI),

* Ketua Umum PB. Persatuan Olah Raga Layar Seluruh Indonesia (PORLASI), dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan

harmonis (*a win-win cooperation*) antara golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat yang diyakini merupakan faktor determinan yang menjadikan negara-negara Eropa Barat sebagai negara maju dan makmur.

Saat ini di Jerman bank Koperasi menguasai 50% pangsa pasar kredit di sektor pertanian dan kehutanan, dan 44% penduduk Jerman terdaftar sebagai anggota Koperasi aktif. Di Denmark, Koperasi mendominasi lebih dari 90% pangsa pasar produk-produk pertanian dan pangan, termasuk ikan, susu, keju, mentega, pakan ternak, dan bibit dan benih tanaman serta hewan/ikan. Di negeri matahari terbit (Jepang), Koperasi konsumsinya meng genggam sekitar 40% dari total transaksi *fresh products* atau produk-produk segar nasional (seperti ikan, daging, sayur-mayur, dan buah-buahan). Sementara di negeri ginseng (Korea Selatan), gerakan Koperasi kreditnya mampu memerdekakan para petani dari tirani rentenir dan bahkan dari bank. Jika sebelum tahun 1980-an, 80% dari kredit seluruh petani bersumber dari para rentenir dan bank, sekarang 72% dari total kredit petani di seantero negeri ginseng berasal dari Koperasi. Di negeri singa (Singapura), 61% dari pangsa pasar jasa taksi dikuasai oleh Koperasi jasa taksi bernama **Comfort (Cooperative Commonwealth for Transport)**. Bahkan di negeri Paman Sam (Amerika Serikat, AS) yang dikenal sebagai kiblatnya kapitalisme global, ternyata Koperasi mampu menjadi salah satu pilar utama perekonomian AS sekaligus sebagai kekuatan penyeimbang (*counter vailing power*) bagi hegemoni kapitalisme yang terbukti telah gagal menekan angka

kemiskinan. Warga negara AS, termasuk para elit politiknya, banyak meyakini bahwa perkembangan Koperasi berkorelasi positif dengan penyusutan angka kemiskinan.

Lebih dari itu, ke banyakan masyarakat AS percaya bahwa Koperasi berperan penting bagi tumbuh-kembangnya iklim demokrasi. Karenanya wajar, jika saat ini lebih dari sepertiga warga AS merupakan anggota Koperasi aktif (Rasyad, 2005). Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa di negara-negara maju terbukti bahwa Koperasi dapat berperan sebagai salah satu soko guru perekonomian bangsa yang tidak hanya mampu mensejahterakan seluruh anggotanya, tetapi menjadi salah satu faktor penentu kemajuan dan kemakmuran bangsanya.

Keempat, bahwa belajar dari pengalaman negara-negara maju di dalam berkoperasi, saya yakin bahwa gerakan Koperasi di Indonesia, termasuk Koperasi perikanan, seharusnya mampu meningkatkan taraf hidup segenap anggotanya dan, sekaligus, menjadi pilar perekonomian nasional menuju Indonesia yang maju, adil-makmur, dan diridloi Tuhan YME. Kalaulah sampai saat ini Koperasi belum berkinerja secara optimal sebagaimana diharapkan, penyebabnya dapat dipastikan karena *'salah urus' (mis-management)*.

Oleh sebab itu, tulisan ini diawali dengan memaparkan secara kronologis sejarah perkembangan Koperasi perikanan di Indonesia, kemudian diikuti dengan analisis kritis tentang kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi perikanan Indonesia, dan sosok (bangun) Koperasi yang

seharusnya berkembang subur di tanah air. Beranjak dari analisis ini, maka solusi revitalisasi Koperasi perikanan ditawarkan dalam tulisan ini.

II. Sejarah Koperasi Perikanan Di Indonesia

Kehadiran Koperasi perikanan di Indonesia sebenarnya sudah lama, jauh sebelum Kemerdekaan RI. Perkumpulan nelayan yang bekerja dalam bentuk Koperasi diawali pada tahun 1912 di Tegal, kemudian berkembang di Karesidenan Pekalongan, Cirebon, dan Semarang yang secara berurutan sebagai berikut:

- 1) Misoyo Mino di Tegal tahun 1912;
- 2) Saya Sari di Sawo Jajar, Brebes tahun 1916;
- 3) Ngupoyo Mino di Batang tahun 1916;
- 4) Misoyo Sari di Tanjung Sari, Pemalang tahun 1919;
- 5) Mino Soyo di Wonokerto, Pekalongan tahun 1919;
- 6) Saya Sumitra di Indramayu tahun 1919;
- 7) Misaya Mina di Eretan, Indramayu tahun 1927;
- 8) Ngupaya Mina di Dadap, Indramayu tahun 1930;
- 9) Mino Sroyo di Bandengan, Kendal tahun 1932;
- 10) Misoyo Ulam di Semarang tahun 1933; dan
- 11) Pabelah Bumi Putera di Gebang Ilir, Cirebon tahun 1933 (Soewito, et.al., 2000).

Berbagai Koperasi perikanan (nelayan) tersebut pada awalnya hanya menyeenggarakan jual beli ikan hasil tangkapan melalui pelelangan, kemudian berkembang

dengan mengadakan usaha perkreditan untuk biaya penangkapan. Pungutan yang diperoleh dari hasil lelang dipergunakan untuk ongkos administrasi, dana asuransi kecelakaan di laut, pembelian bahan perikanan, pembuatan perahu, dan pengolahan ikan secara tradisional (seperti pengasinan, pengeringan, dan pemindangan). Dalam masa pendudukan Jepang (1942-1945), semua organisasi nelayan itu dijadikan Koperasi **Kumiai** Perikanan. Tugas utamanya adalah mengumpulkan dan mengawetkan ikan untuk keperluan bala tentara Jepang.

Setelah kemerdekaan RI, mulailah diadakan pembenahan organisasi Koperasi perikanan. Pada Kongres Koperasi Perikanan Laut ke-1 tanggal 11 April 1947 di Magelang dibentuklah Gabungan Pusat Koperasi Perikanan Indonesia (GPKPI) dengan tujuan:

- (1) Meningkatkan taraf hidup nelayan yang layak sebagai warga negara yang merdeka,
- (2) Meningkatkan produksi perikanan laut untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Oleh karena GPKPI direstui oleh Departemen Perekonomian, maka GPKPI merupakan organisasi persatuan Koperasi yang pertama dan tertua di tanah air, yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, GPKPI oleh Departemen Pertanian ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi usaha yang mewakili masyarakat nelayan seluruh Indonesia.

Keanggotaan GPKPI terdiri dari seluruh Pusat Koperasi Perikanan Laut yang wilayah

kerjanya masing-masing mencakup satu Karesidenan. Pada masa ini hirarki organisasi GPKPI terdiri dari tiga tingkat:

- (1) Koperasi Perikanan Laut (KPL) primer tingkat Kabupaten,
- (2) Pusat Koperasi Perikanan Laut (PKPL) tingkat Keresidenan, dan
- (3) GPKPI tingkat nasional. Sehubungan dengan upaya Belanda untuk menjajah kembali Indonesia melalui Agresi I dan II (1946-1948), maka kinerja GPKPI yang sebelumnya baik menjadi menurun drastis.

Pada tahun 1950 setelah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, GPKPI mengadakan konsolidasi organisasi. Kemudian, dalam rapat tahunan GPKPI yang juga dihadiri dan mendapat pengarahannya dari Bung Hatta (sebagai Bapak Koperasi Indonesia) pada tahun 1951 di Semarang, organisasi disederhanakan menjadi dua tingkat saja:

- (1) Koperasi Perikanan Laut (KPL) Primer,
- (2) Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia (GKPI).

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 60/1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi, organisasi berubah menjadi tiga tingkat lagi. Kemudian dalam Musyawarah Koperasi Perikanan Laut tahun 1962 di Cipanas, berubah menjadi empat tingkat yaitu:

- (1) Koperasi Perikanan Laut (KPL) tingkat Primer
- (2) Pusat Koperasi Perikanan Laut (PKPL) tingkat Kabupaten
- (3) Gabungan Koperasi Perikanan Laut (GKPL) tingkat Propinsi, dan
- (4) Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI) tingkat Nasional.

Untuk membina Koperasi perikanan pada tahun 1969 dikeluarkan Surat Keputusan

Bersama (SKB) Direktorat Jenderal Koperasi dan Direktorat Jenderal Perikanan yang mengatur bahwa pembinaan manajemen dan organisasi Koperasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Koperasi, sementara pembinaan teknis perikanan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perikanan. Kemudian, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, dan kemudian instruksi Presiden No. 2/1997 tentang Pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD), susunan organisasi akhirnya berubah menjadi:

- (1) KUD Mina (tingkat Kecamatan/Kabupaten),
- (2) PUSKUD Mina (tingkat Propinsi), dan
- (3) IKPI (tingkat Nasional).

Dalam perkembangan selanjutnya, usaha budidaya ikan, penangkapan ikan di perairan umum, bersama usaha penangkapan di laut, dimaksudkan ke dalam KUD Mina. Hal ini terlihat dari fungsi KUD Mina yang meliputi : bimbingan dan penyuluhan, peningkatan jumlah anggota, pemupukan swadaya anggota nelayan dan petani ikan, dan menyiapkan tenaga pendidikan dan latihan bagi nelayan dan petani ikan. Semuanya dalam kesatuan organisasi Koperasi nelayan/petani ikan. Namun sayang, pelaksanaannya di lapangan kurang konsisten.

III. Kendala Dan Permasalahan

Meskipun pergerakan Koperasi perikanan di Indonesia menghadapi begitu banyak kendala dan permasalahan, namun secara kuantitatif Koperasi perikanan mengalami pertumbuhan cukup pesat. Pada tahun 2003 jumlah KUD Mina di seluruh Indonesia mencapai 887 buah (DKP, 2003) dan sekitar 15 PUSKUD Mina/Pusat Koperasi Perikanan (PKP) (IKPI, 2005).

Permasalahannya adalah bahwa sebagian besar Koperasi perikanan sampai saat ini belum berkinerja secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Kebanyakan Koperasi perikanan sejauh ini belum mampu memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi para anggotanya, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah serta pedagang produk perikanan skala kecil. Apalagi menjadi pilar perekonomian bangsa sebagaimana kisah keberhasilan di Denmark, Jepang, Kanada, dan negara-negara lainnya seperti saya uraikan di atas.

Adapun kendala dan permasalahan yang menyebabkan kinerja Koperasi perikanan pada umumnya rendah adalah:

- (1) Kualitas sumberdaya manusia (SDM) pengurus dan pengelola Koperasi perikanan sebagian besar masih rendah,
- (2) Lemahnya manajemen,
- (3) Kurangnya permodalan,
- (4) Ulah para pengusaha sebagai kompetitor Koperasi,
- (5) Kurangnya kesadaran masyarakat perikanan akan arti penting Koperasi,
- (6) kurangnya keberpihakan pemerintah kepada Koperasi perikanan.

Pada umumnya kualitas SDM pengurus dan pengelola Koperasi perikanan tidak memiliki kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) yang memadai, baik dalam hal manajemen dan organisasi Koperasi maupun dalam hal teknis dan bisnis perikanan yang mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya, penanganan dan pengolahan hasil perikanan, serta perdagangan produk perikanan. Selain kelemahan teknis-manajemen.

Sering kali para pengurus dan pengelola Koperasi perikanan juga dilanda penyakit moral (*moral hazard*), kerja malas, tidak kreatif dan produktif, tetapi korupsi. Karena itu, ada KUD sering kali dipelesetkan menjadi '*Ketua Untung Dulu*'. Dengan kondisi kualitas SDM pengurus dan pengelola Koperasi perikanan semacam ini, wajar jika banyak Koperasi yang rugi melulu (*cost center*) atau kalaupun *survive*, jalannya terengah-engah. Bagaimana hendak mensejahterakan para anggotanya, kalau dirinya sendiri '*harus dirawat jalan*'?.

Kendala berikutnya yang sangat menghambat kinerja Koperasi perikanan, meskipun seolah-olah klise, adalah minimnya permodalan. Sebuah Koperasi perikanan (nelayan) yang berhasil, seperti yang saya saksikan langsung di Lunenburg, Nova Scotia, Canada; Jeddah, Saudi Arabia; dan hampir semua Koperasi perikanan di Jepang dan Denmark, adalah Koperasi yang dapat memasok segenap faktor produksi atau *production inputs* untuk keperluan melaut menangkap ikan, termasuk alat tangkap, mesin kapal, BBM, es, beras, dan perbekalan lainnya, secara kontinu dan harga relatif lebih murah atau paling tidak sama dengan harga pasar.

Selain itu, Koperasi nelayan yang berhasil juga dapat membeli hasil tangkap para nelayan dengan harga bersaing setiap saat. Hal ini memerlukan kemampuan untuk menangani (*handling*), mengolah (*processing*), dan memasarkan (*marketing*) produk perikanan. Koperasi nelayan yang berhasil juga mampu melaksanakan fungsi simpan-pinjam bagi para nelayan yang saling menguntungkan, sehingga nelayan terbebas dari jeratan para pengijon dan tengkulak.

Sementara di tanah air, banyak Koperasi perikanan yang tidak mampu membayar tunai hasil tangkapan yang dilelang (dijual) melalui Koperasi, sehingga para nelayan akhirnya lebih senang menjual hasil tangkapan ikannya kepada para bakul (tengkulak) meskipun dengan harga yang lebih murah ketimbang bila dilelang di Koperasi. Alasannya sederhana, karena Koperasi tidak memiliki modal yang mencukupi untuk membayar tunai hasil tangkapan para nelayan termaksud.

Perilaku ingin meraup untung sebesar-besarnya tanpa mengindahkan nasib nelayan (*rent-seeking behavior*) para pengusaha menengah-besar di wilayah dimana Koperasi berada juga seringkali mematickan kinerja Koperasi perikanan. Dalam prakteknya para '*pengusaha nakal*' menjual seluruh kebutuhan melaut para nelayan (alat tangkap, BBM, beras, rokok, dan lain-lain) lebih murah dari pada yang selama ini disediakan oleh Koperasi perikanan. Pada saat yang sama, para pengusaha pemburu rente ini membeli ikan hasil tangkapan lebih mahal ketimbang yang selama ini dibeli oleh Koperasi perikanan.

Praktek semacam ini dilakukan oleh para pengusaha nakal sampai Koperasi tidak mampu bersaing dan akhirnya gulung tikar. Setelah Koperasi perikanan bangkrut, baru kemudian para lintah darat, tengkulak, dan pemburu rente ini mencekik leher para nelayan, dengan cara menaikkan semua bahan kebutuhan melaut lebih mahal ketimbang harga pasar, dan sebaliknya membeli hasil tangkap nelayan dengan harga yang jauh lebih murah dari pada harga pasar.

Sampai saat ini kebanyakan masyarakat perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang produk perikanan berskala kecil) belum sadar atau tidak memahami, bahwa jika Koperasi dijalankan dengan benar, sebagaimana saya uraikan di atas, sesungguhnya mampu meningkatkan posisi tawar mereka dan meningkatkan kesejahteraannya. Dan, di Indonesia pun beberapa Koperasi perikanan yang dikelola secara profesional dan benar, seperti KUD Mina Fajar Sidik, Subang; Koperasi Perikanan Mina Jaya, DKI Jakarta; KUD Mina Misoyo Sari Pernalang; KUD Mina Makaryo Mino Pekalongan; KUD Mina Sarono Mino, Juwana, Pati; KUD Mina Mino Saroyo; dan KUD Mina Tani, Lamongan terbukti mampu memberikan manfaat ekonomi bagi para anggotanya (Ir. Wibisono, Ketua Umum IKPI, personal communication, 2005).

Kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian besar masyarakat perikanan tentang arti penting dan peran strategis Koperasi bagi kesejahteraan hidup mereka kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan citra buruk Koperasi itu sendiri.

Akhirnya, belum optimalnya kinerja sebagian besar Koperasi perikanan juga diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang belum memihak kepada Koperasi. Sampai sekarang, semua Koperasi di Indonesia tidak memiliki akses terhadap aset ekonomi produktif, terutama permodalan dan informasi. Sementara Koperasi sangat sukar memperoleh kredit dari perbankan, pengusaha swasta besar. Dilain Pihak perusahaan BUMN dengan mudah menikmati

kredit perbankan. Ini terbukti bahwa sejak zaman Orde Baru hingga sekarang jumlah kredit yang diberikan kepada UKMM (Usaha Kecil Menengah dan Mikro), yang jumlahnya lebih dari 90% seluruh unit usaha nasional, tidak lebih dari 10%.

Lembaga perbankan kita lebih suka memberikan kredit kepada konglomerat hitam macam Edy Tanzil dan Adrian Woworuntu, menyimpan uang dalam bentuk SBI (Sertifikat Bank Indonesia), atau main valas, ketimbang memberikan kredit kepada sektor riil yang berbasis sumberdaya alam dan kerakyatan, termasuk Koperasi perikanan. Hal inilah yang membuat hampir semua Koperasi perikanan di tanah air tidak pernah memiliki dana cukup untuk menjalankan usahanya secara profesional dan memenuhi **economy of scale** (skala ekonomi). Akibatnya, Koperasi banyak yang rugi dan akhirnya bangkrut.

IV. Solusi Terpadu Untuk Menjadikan Koperasi Sebagai Pilar Perekonomian Yang Mensejahterakan Masyarakat Perikanan

Selain sebagai *homo sapiens* (makhluk biologi) dan *homo religiosa* (makhluk beragama), manusia juga merupakan *homo economicus* (makhluk ekonomi) yang di dalam mengambil keputusan atau melakukan pekerjaan hampir semuanya berdasarkan perhitungan untung-rugi. Keputusan nelayan atau pembudidaya ikan untuk menjadi anggota Koperasi pun pada umumnya berdasarkan pertimbangan untung-rugi. Oleh sebab itu, membenahi (revitalisasi) kinerja dunia Koperasi perikanan di Indonesia hendaknya diarahkan

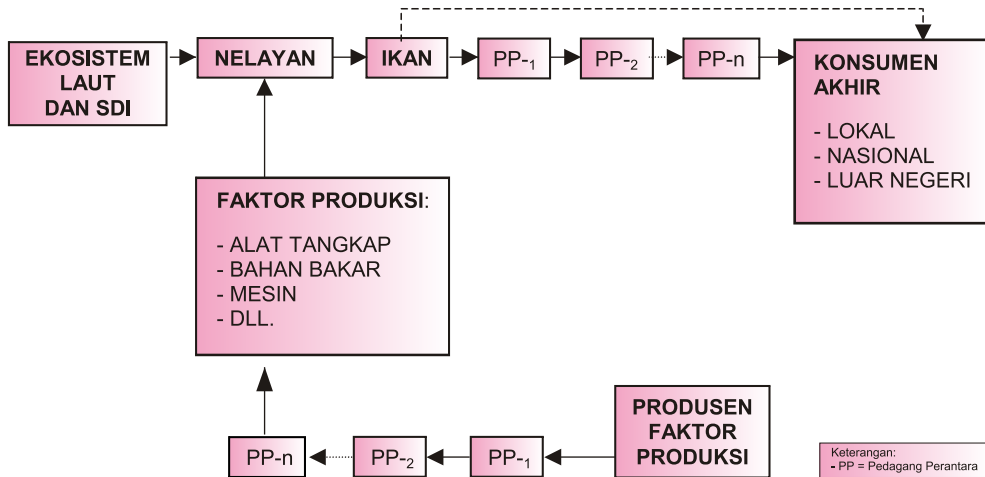
(tujuan akhir atau **the ultimate goal** nya) agar seluruh Koperasi perikanan di Indonesia memberikan berkah ekonomi (dapat meningkatkan posisi tawar dan kesejahteraan) bagi segenap anggotanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sejumlah kendala dan permasalahan yang saya uraikan di atas (Bab III) harus segera diatasi. Selanjutnya, revitalisasi Koperasi perikanan hendaknya bersifat **site specific** (spesifik lokasi atau daerah) dan spesifik usaha. Dengan lain perkataan, program revitalisasi Koperasi perikanan harus mempertimbangkan kondisi daerah dimana Koperasi berada dan karakter usahanya. Usaha perikanan adalah sistem bisnis perikanan yang meliputi kegiatan pra-produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan (Pasal 25, UU No.31/2004 tentang Perikanan). Dengan demikian, pada prinsipnya usaha perikanan mencakup kegiatan usaha:

- (1) Perikanan tangkap,
- (2) Perikanan budidaya,
- (3) Pengolahan hasil perikanan, dan
- (4) Pemasaran hasil perikanan.

Pendapatan nelayan (salah satu faktor dominan yang menentukan kesejahteraan nelayan) sangat dipengaruhi oleh hasil tangkapan ikan, harga jualnya, dan biaya (**cost**) melaut. Selanjutnya, hasil tangkap ditentukan oleh ketersediaan stok ikan dan kemampuan /efisiensi teknologi penangkapan ikan (kapal ikan dan alat tangkapnya). Sedangkan harga ikan sangat bergantung pada jenis ikan dan kualitas (kesegaran) ikan serta sistem rantai tata niaga yang berlaku di suatu daerah.

**Gambar 1. Posisi Nelayan/Pembudidaya Ikan
Dalam Sistem Rantai Tata Niaga**



Posisi nelayan dalam sistem rantai tata niaga perikanan (lihat Gambar 1) sangat dirugikan. Ketika nelayan membeli faktor/input produksi (seperti alat tangkap, jaring, es, beras, dan perbekalan untuk menangkap ikan lainnya), harganya lebih mahal dari pada harga sebenarnya di tingkat produsen (pabrik) faktor-faktor produksi dimaksud. Contohnya, harga solar di SPBU resmi Rp 2.100/liter, nelayan di Tangerang harus membeli dengan harga Rp 2.500/liter dan nelayan di P.Miangas, Sulawesi Utara dengan harga Rp 8.000/liter. Harga eceran es di pabrik es Muara Karang sebesar Rp 4.500/balok, sedangkan nelayan di lokasi yang sama harus membeli es dengan harga Rp 6.000/balok. Sebaliknya, pada saat para nelayan menjual hasil ikan tangkapannya, maka harganya jauh lebih murah dari pada harga pasar sebenarnya di tingkat konsumen (pasar) akhir.

Kondisi serupa juga dialami oleh para pembudidaya ikan berskala kecil. Penulis pada

tahun 2001 menyaksikan langsung para pembudidaya ikan Koi di Blitar Selatan menjual ikan Koi kecil (ukuran rata-rata 5 cm) kepada bakul (pedagang perantara) dari Jakarta seharga Rp 400/ekor. Para pedagang perantara ini membawa ikan Koi kecil ke Jakarta dan memeliharanya selama kurang lebih 3 bulan, dan menjualnya kepada para pembeli di Jakarta dengan harga Rp 14.000/ekor. Padahal ongkos transportasi dan biaya pemeliharaan ikan Koi tersebut hanya Rp 3.000/ekor. Demikian juga halnya, pada saat para pembudidaya ikan berskala kecil membeli input produksi (seperti benih ikan dan pakan), maka harganya jauh lebih mahal dari pada harga di tingkat produsen.

Permasalahan lain yang seringkali dihadapi para nelayan kita adalah situasi dimana kalau hasil tangkap sedang rendah (musim paceklik), maka harga jual ikan murah. Namun, pada saat musim baik dan hasil tangkap nelayan besar biasanya harga jual ikan mendadak turun

drastis. Selain karena permainan para tengkulak, turunnya harga ikan secara drastis juga disebabkan karena pasar lokal sudah jenuh.

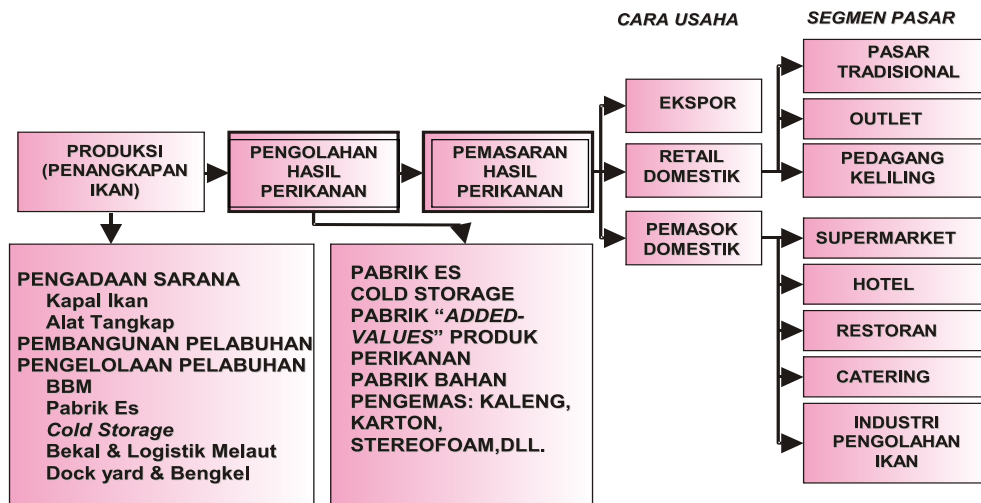
Disinilah urgensi kehadiran sebuah Koperasi perikanan yang mampu memangkas panjangnya mata rantai tata niaga perikanan, baik pada sisi *input* maupun *output*. Sebuah Koperasi perikanan yang memiliki permodalan, kemampuan organisasi dan manajemen, dan kemampuan teknis; sehingga dapat meminjamkan modal dengan persyaratan lunak (tidak sekaku lembaga perbankan saat ini) kepada setiap anggotanya yang membutuhkan untuk modal kerja maupun investasi.

Selain itu, Koperasi perikanan yang demikian juga akan dapat memasok seluruh

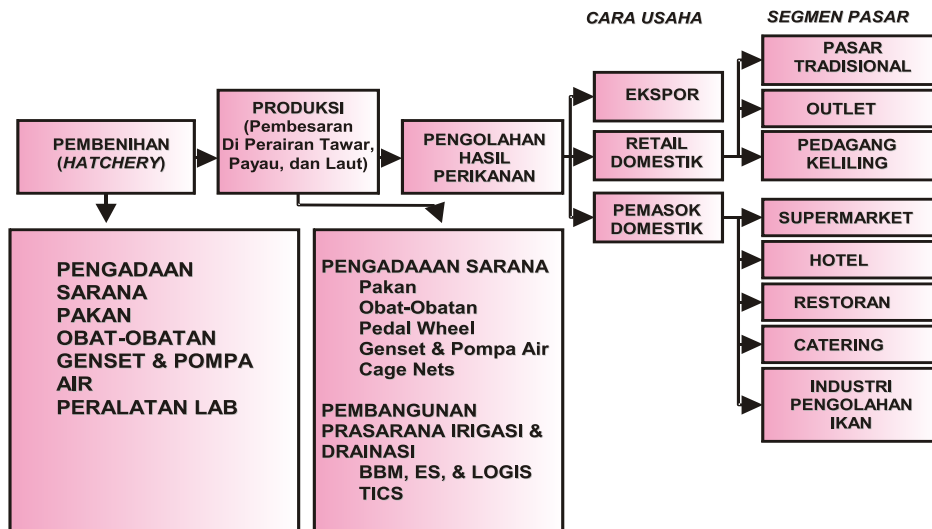
faktor/input produksi (baik pada usaha penangkapan ikan maupun budidaya perikanan) yang diperlukan oleh para anggotanya dengan kualitas baik, harga bersaing, dan tersedia kontinu. Pada saat yang sama, Koperasi perikanan ini pun akan mampu membeli hasil tangkap atau produksi budidaya perikanan dari para anggotanya setiap saat, dengan volume berapa saja, dan harga sama dengan harga pasar serta stabil. Secara diagramatis Koperasi perikanan tangkap yang mampu memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi para anggotanya memiliki kemampuan (unit usaha) seperti disajikan pada Gambar 2. Sedangkan Koperasi perikanan budidaya disajikan pada Gambar 3.

Koperasi perikanan juga harus menjalin kerjasama dengan dinas-dinas dan

Gambar 2. Koperasi Perikanan Tangkap dengan Unit-Unit Usahanya



Gambar 3. Koperasi Perikanan Budidaya dengan Unit-Unit Usahanya



departemen serta lembaga lain yang terkait dengan perkoperasian perikanan untuk melakukan penyuluhan, pembinaan, dan pendampingan kepada para anggotanya, baik itu para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, maupun pedagang produk perikanan. Aspek-aspek penyuluhan, pembinaan, dan pendampingan dapat mencakup aspek teknis perikanan, manajemen keuangan keluarga, kesadaran tentang arti penting Koperasi bagi kehidupan ekonomi mereka, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh para tengkulak,

rentenir, dan kelompok kepentingan lainnya yang tidak menginginkan adanya Koperasi.

Sudah saatnya Indonesia memiliki Koperasi perikanan yang memiliki kemampuan lengkap sesuai kebutuhan para anggotanya sebagaimana digambarkan di atas. Disinilah perlunya keberpihakan (affirmative policies) dari pemerintah untuk mendukung penuh tumbuh-kembangnya Koperasi perikanan di seluruh nusantara. Terutama dalam hal dukungan aset ekonomi produktif bagi Koperasi perikanan, dan lebih khusus lagi tersedianya permodalan. ■